

Dari Marga ke Politik: Analisis Feminisme terhadap Reproduksi Patriarki dan Dominasi Maskulin di Sumatera Utara

From Clan to Politics: A Feminist Analysis of the Reproduction of Patriarchy and Masculine Dominance in North Sumatra

Dominique Jacqueline Tirza^{1*}, Erly Marlinda², Ika Arinia Indriyany³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 February 2026

Revised 25 February 2026

Accepted 27 February 2026

Available online 15 March 2026

Keywords: patriarchy, clan system, feminism, local politics, North Sumatra.

Keywords : patriarki, sistem marga, feminisme, politik lokal, Sumatera Utara.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRACT

This study aims to analyze the reproduction of patriarchy and masculine dominance in local politics in North Sumatra through a feminist perspective, highlighting the role of the patrilineal clan system in shaping social and political power structures. In Batak society, lineage is traced through men, thus positioning men as the successors of the clan and the primary representatives in both customs and social life. This condition causes male authority not only to remain within the family sphere but also extends into the public sphere, including local political practices. This study uses a qualitative approach with a desk study method through a review of literature, scientific journals, and regulations related to gender, customs, and local politics. The results show that patriarchy is reproduced through the clan system, customary practices, and the concept of Daliha Na Tolu, which strengthens men's legitimacy in leadership and kinship-based power networks. In political contests, masculinity is often used as symbolic capital to gain voter trust, resulting in low female representation despite the 30 percent affirmative action quota policy. These obstacles are not only structural but also cultural, as customary norms still position men as more worthy figures for

leadership. Therefore, efforts to achieve gender equality require changes not only in formal policies but also in cultural values and social practices within society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis reproduksi patriarki dan dominasi maskulin dalam politik lokal di Sumatera Utara melalui perspektif feminisme, dengan menyoroti peran sistem marga patrilineal dalam membentuk struktur kekuasaan sosial dan politik. Dalam masyarakat Batak, garis keturunan ditarik melalui laki-laki sehingga laki-laki diposisikan sebagai penerus marga dan representasi utama dalam adat maupun kehidupan sosial. Kondisi ini menyebabkan otoritas laki-laki tidak hanya bertahan dalam ruang keluarga, tetapi juga meluas ke ranah publik, termasuk dalam praktik politik lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian literatur, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan gender, adat, dan politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patriarki direproduksi melalui sistem marga, praktik adat, dan konsep Daliha Na Tolu yang memperkuat legitimasi laki-laki dalam kepemimpinan serta jaringan kekuasaan berbasis kekerabatan. Dalam kontestasi politik, maskulinitas sering dijadikan modal simbolik untuk memperoleh kepercayaan pemilih, sehingga keterwakilan perempuan tetap rendah meskipun terdapat kebijakan afirmatif kuota 30 persen. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural karena norma adat masih menempatkan laki-laki sebagai figur yang lebih layak memimpin. Oleh karena itu, upaya mencapai kesetaraan gender memerlukan perubahan tidak hanya pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai budaya dan praktik sosial dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan sistem kekerabatan yang berbeda di setiap daerah. Sistem kekerabatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan, pembagian peran gender, serta legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat (Kinanti & Hasan,

*Corresponding Author

Email: dominiquejts18@gmail.com, erlymarlindaaa@gmail.com, ika.arinia@untirta.ac.id

2025) Dalam banyak komunitas adat, nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun seringkali mengandung pola relasi yang bersifat patriarki, yaitu menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Struktur patriarki tersebut tidak hanya bertahan dalam ruang domestik, tetapi juga meluas ke ruang publik, termasuk dalam praktik politik lokal dan pemerintahan.

Di Sumatera Utara, khususnya dalam masyarakat Batak, sistem marga yang bersifat patrilineal menjadi pondasi utama dalam pengorganisasian sosial. Garis keturunan ditarik melalui laki-laki, sehingga laki-laki diposisikan sebagai penerus marga, pemegang otoritas keluarga, serta representasi utama dalam berbagai kegiatan adat. Rahman & Ziaulhaq (2021) Struktur ini diperkuat melalui praktik budaya yang berlangsung dalam siklus kehidupan seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, yang secara tidak langsung mereproduksi legitimasi kekuasaan laki-laki dari generasi ke generasi. Akibatnya, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat dan memiliki keterbatasan akses dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Dalam konteks politik lokal di Sumatera Utara, dominasi laki-laki masih terlihat dalam rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun dalam jabatan pemerintahan. Meskipun negara telah menerapkan kebijakan afirmatif seperti kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan, kenyataannya partisipasi perempuan dalam politik masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap perempuan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kultural, karena norma adat dan sistem kekerabatan masih memandang laki-laki sebagai figur yang lebih layak memimpin. Dengan demikian, struktur patriarki yang berasal dari ruang adat terus direproduksi dalam ruang politik melalui proses legitimasi sosial, simbolik, dan institusional.

KAJIAN TEORITIS

Theorizing Patriarchy (Sylvia Walby)

(Walby, 1990) mendefinisikan patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik sosial yang memungkinkan laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Patriarki bekerja melalui berbagai institusi yang saling terhubung, seperti keluarga, budaya, negara, dan sistem kerja, sehingga dominasi laki-laki terus direproduksi secara sosial. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai patriarki dalam adat dan sistem marga bertransformasi menjadi struktur kekuasaan dalam politik lokal. Patriarki tidak hanya hadir dalam hubungan individu, tetapi juga bekerja melalui berbagai institusi sosial seperti keluarga, budaya, negara, dan sistem ekonomi yang secara terus-menerus memproduksi dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial.

Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui beberapa struktur utama, yaitu produksi rumah tangga, hubungan kerja, negara, kekerasan laki-laki terhadap perempuan, seksualitas, dan institusi budaya. Struktur-struktur tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang mempertahankan posisi dominan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan menggunakan perspektif patriarki dari Sylvia Walby, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai patriarki yang terkandung dalam adat dan sistem marga dapat bertransformasi menjadi struktur kekuasaan dalam politik lokal. Kerangka teori ini membantu memahami bagaimana norma budaya dan struktur sosial tertentu berkontribusi terhadap reproduksi dominasi laki-laki serta mempengaruhi partisipasi dan posisi perempuan dalam arena politik lokal (Tambunan & Sihotang, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang merujuk pada teori Creswell (2018), di mana fokus utamanya adalah mengeksplorasi dan memahami makna subjektif yang dikonstruksi oleh individu maupun kelompok terkait persoalan sosial dan kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Data dikumpulkan melalui teknik identifikasi dan penelusuran literatur yang komprehensif, mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber digital yang kredibel. Selain itu, dilakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah (Perda) maupun hukum adat guna memperkuat basis argumentasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Budaya dan Akar Sosiologis Patriarki dalam Sistem Marga

a. Sistem patrilineal dan struktur marga sebagai basis pengorganisasian sosial.

Sistem patrilineal yang diartikan sebagai sistem yang menurun garis keturunan dari ayah, yang dinilai mempunyai kedudukan penting dan mengacu pada sistem kekerabatan berdasarkan garis ayah yang lebih dulu mengutamakan kedudukan seorang laki laki daripada perempuan. Ada suatu prinsip patrilineal yaitu menghitung bahwa hubungan kekerabatan hanya dapat melalui laki laki, sementara kerabat ibu tidak dapat dihitung dalam batas yang ada (Koentjaraningrat, 1985).

Struktur marga yang berbasis kekeluargaan dan patrilineal yang menekan dan meletakkan perempuan pada posisi yang subordinasi dalam suatu keluarga. Yang kita dapat diketahui dengan banyak opini di masyarakat bahwa suku batak itu sendiri menganut sistem patriarki yang di dominasi oleh orang batak dalam sebagian orang di suku tersebut. Budaya patriarki ini didapatkan baik secara turun temurun yang mengakibatkan adanya perbedaan yang cukup jelas baik dari segi perilaku dan status serta otoritas. Sebagai pemimpin dari sebuah keluarga, laki laki dapat memiliki kekuasaan yang meliputi kontrol di dalam kekayaan dan suatu pembagian prioritas keluarga (Santoso et al, 2023)

Walby dalam teorinya menjelaskan bahwa praktik kehidupan sosial, struktur marga ataupun silsilah juga mengatur berbagai bentuk interaksi sosial, seperti hubungan kekeluargaan, kerjasama dalam kegiatan adat, serta dukungan sosial dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, marga tidak hanya berperan sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai sistem yang mengorganisasi hubungan sosial, memperkuat solidaritas kelompok, dan membentuk struktur komunitas dalam masyarakat Batak.

b. Reproduksi norma melalui praktik adat (lahir, kawin, mati) sebagai sarana internalisasi otoritas laki-laki.

Reproduksi norma patriarki dalam masyarakat tidak terjadi secara alami, tetapi berlangsung melalui praktik sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi (Agustina & Syarifuddin, 2025). Salah satu sarana utama reproduksi tersebut adalah praktik adat dalam siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam banyak masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seperti pada masyarakat bermarga di Sumatera Utara, setiap tahapan kehidupan diatur oleh adat yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Pada saat kelahiran, identitas anak ditentukan melalui garis ayah sehingga laki-laki diposisikan sebagai penerus marga dan penjaga garis keturunan.

Dalam perkawinan, perempuan umumnya masuk ke dalam keluarga laki-laki dan keputusan adat lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki, terutama oleh tetua adat. Sementara dalam upacara kematian, struktur keluarga laki-laki kembali menjadi penentu utama dalam pelaksanaan ritual maupun dalam pembagian warisan (Damayanti & Putra, 2025). Proses ini menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya bertahan karena kekuasaan formal, tetapi juga karena

didukung oleh tradisi yang terus mereproduksi legitimasi maskulinitas dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pemikiran *Pierre Bourdieu* tentang reproduksi sosial, kebiasaan yang berlangsung terus-menerus akan membentuk habitus yang membuat dominasi tertentu terlihat alami (Widyantari, 2025).

Transformasi Maskulinitas ke dalam Kontestasi Politik dan Pemerintahan Lokal

a. Maskulinitas sebagai modal politik dalam memperoleh legitimasi dan kepercayaan pemilih.

Pembahasan mengenai maskulinitas tidak dapat dipisahkan dari konsep gender. Gender dipahami berbeda dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin merupakan kondisi biologis yang melekat pada individu sejak lahir. Sementara itu, gender dipandang sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk oleh nilai, norma, serta pandangan yang berkembang dalam masyarakat (Kurnia, 2004). Maskulinitas merupakan stereotip yang dilekatkan pada laki-laki dalam konstruksi gender dan sering dipertentangkan dengan femininitas yang diasosiasikan dengan perempuan. Konsep maskulin dan feminin dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan dalam spektrum kemanusiaan, di mana setiap individu dapat berada pada tingkat tertentu dari karakteristik kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (femininitas).

Laki-laki yang menunjukkan ciri-ciri yang sesuai dengan stereotip maskulin umumnya dianggap sebagai laki-laki yang gagah dan kuat, sedangkan laki-laki yang tidak menunjukkan ciri tersebut sering dipersepsikan sebagai kurang maskulin atau bahkan feminin. Hal yang sama juga berlaku pada perempuan ketika karakteristik mereka dinilai berdasarkan stereotip gender yang ada (Darwin, 1999). Karena maskulinitas merupakan bagian dari stereotip gender, maknanya dapat berbeda-beda di setiap masyarakat, budaya, kelas sosial, maupun tingkat perkembangan peradaban. Darwin (1999) menjelaskan bahwa maskulinitas maupun femininitas merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat dimaknai secara beragam oleh masyarakat

Menurut Connell (2005), maskulinitas memiliki beragam bentuk, di mana maskulinitas hegemonik menempati posisi dominan dalam struktur sosial dan secara sistematis menyingkirkan bentuk maskulinitas maupun identitas lain yang dianggap berbeda. Connell juga menawarkan perspektif baru dalam memahami gender dengan menolak pendekatan dikotomis yang secara kaku memisahkan laki-laki dan perempuan. Komunikasi pemasaran politik merupakan penerapan konsep komunikasi pemasaran dalam kegiatan politik. Dalam sistem negara yang menggunakan mekanisme elektoral, para aktor politik berperan sebagai komunikator yang menjalankan fungsi pemasaran untuk memperkenalkan serta menawarkan produk politik kepada masyarakat atau pemilih. (Sahid & Budianto, 2022). Komunikasi pemasaran politik dapat dipahami sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendukung dan mensukseskan pencalonan suatu partai politik maupun aktor politik, terutama melalui berbagai aktivitas kampanye yang dilakukan kepada masyarakat atau pemilih. (Kington et al., 2018).

Saat ini, konsep branding dalam dunia politik semakin mendapat perhatian dalam kajian pemasaran maupun ilmu politik. Hal ini terjadi karena berkembangnya pandangan bahwa partai politik maupun tokoh politik dapat diposisikan dan dikelola layaknya sebuah merek (brand) yang mampu mempengaruhi serta menggerakkan dukungan masyarakat (Needham & Smith, 2015 ; Asbari et al., 2024) Dominasi laki-laki dalam dunia politik sering kali menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap isu gender (Setiawan, 2018). Hal ini terjadi karena rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih mengutamakan kepentingan laki-laki atau kelompok yang memiliki kekuasaan.

Akibatnya, berbagai isu penting yang berkaitan dengan perempuan, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap perempuan, sering kali

tidak menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga membatasi cakupan kebijakan publik yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen dapat mengurangi kualitas demokrasi karena lembaga tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan beragam perspektif dalam masyarakat. (Sitompul et al., 2025).

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten Kota	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	2024	2024	2024
Sumatera Utara	81	17	98
Nias	23	2	25
Mandailing Natal	37	3	40
Tapanuli Selatan	32	3	40
Tapanuli Tengah	27	8	35
Tapanuli Utara	33	2	35
Toba	26	4	30
Labuhan Batu	42	3	45
Asahan	38	7	45
Simalungun	46	4	50
Dairi	33	2	35
Karo	31	9	40
Deli Serdang	47	3	50
Langkat	45	5	50
Nias Selatan	31	4	35
Humbang Hasundutan	25	5	30
Pakpak Bharat	19	1	20
Samosir	22	3	25
Serdang Bedagai	40	5	45
Batu Bara	31	4	35
Padang Lawas Utara	27	3	30
Padang Lawas	30	0	30
Labuhanbatu Selatan	32	3	35
Labuanbatu Utara	34	1	35
Nias Utara	23	2	25
Nias Barat	17	3	20
Sibolga	17	3	20
Tanjungbalai	17	8	25
Pematangsiantar	25	5	30
Tebing Tinggi	22	3	25
Medan	42	8	50
Binjai	30	5	35
Padangsidempuan	21	9	30
Gunungsitoli	21	4	25

Sumber: BPS statistik

Namun, dominasi citra maskulinitas dalam politik juga memiliki implikasi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Data keanggotaan DPRD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara jumlah anggota laki-laki dan perempuan. Dari total 98 anggota DPRD, sebanyak 81 orang merupakan laki-laki, sedangkan perempuan hanya berjumlah 17 orang. Ketika kepemimpinan lebih sering diasosiasikan dengan karakter maskulin, perempuan cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi politik. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam lembaga politik menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya kebijakan yang responsif terhadap isu-isu gender.

b. Politik Identitas (Daliha Na Tolu) sebagai instrumen legitimasi kekuasaan lokal.

Masyarakat Batak merupakan salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan kompleks. Sistem kekerabatan ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, adat istiadat, hingga struktur kekuasaan dalam masyarakat. Salah satu ciri paling khas dari masyarakat Batak adalah penggunaan **marga** sebagai identitas genealogis yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan laki-laki. Politik identitas dalam masyarakat berbasis kekerabatan sering digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan lokal, terutama ketika struktur sosial adat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat (Harianja et al., 2025)

Dalam konteks masyarakat Batak di Sumatera Utara, konsep **Daliha Na Tolu** tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai budaya, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun relasi sosial, solidaritas, dan hirarki kewenangan. Daliha Na Tolu berarti **“tungku yang tiga”**, yaitu tiga batu penyangga tungku yang harus seimbang agar bisa digunakan. Mengatur hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, yang pada prakteknya menciptakan struktur penghormatan dan ketaatan yang kuat terhadap pihak tertentu, terutama laki-laki yang memegang posisi sebagai representasi marga (Soetanto & Gandha, 2021). Struktur ini kemudian tidak hanya berlaku dalam ruang adat, tetapi juga merambah ke ruang publik, termasuk dalam proses politik lokal seperti pemilihan kepala daerah, pembentukan jaringan dukungan, dan distribusi kekuasaan.



Realitas politik di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak hanya ditentukan oleh program atau ideologi partai, tetapi juga oleh faktor kedekatan sosial, jaringan kekerabatan, serta latar belakang etnis dan marga. *Tetapi Struktur Daliha Na Tolu tidak hanya mengatur hubungan kekerabatan, tetapi juga memproduksi sistem patriarki karena garis keturunan ditarik melalui laki-laki, sehingga laki-laki memperoleh posisi simbolik sebagai representasi utama marga.* Kondisi ini menyebabkan legitimasi sosial dan politik lebih mudah diberikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga struktur adat secara tidak langsung memperkuat dominasi maskulin dalam ruang publik maupun politik lokal.

Akibatnya, politik lokal seringkali diwarnai oleh praktik politik identitas yang memperkuat dominasi kelompok tertentu, terutama laki-laki, karena struktur adat bersifat patrilineal dan menempatkan laki-laki sebagai representasi utama keluarga dan marga (Rahmayanty et al., 2022).

Akibat utama dari legitimasi kekuasaan lokal yang bersumber dari struktur adat Dalihan Na Tolu adalah bahwa proses politik tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip demokrasi yang netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, identitas marga, dan pengakuan adat. silsilah nama marga sebagai identitas pribadi harus tetap dijunjung tinggi. Tanpa identitas ini, hidup mereka akan sia-sia. Itulah alasannya kenapa marga dalam adat Batak amat penting. Menurut (Arzuliany & Abdullah, 2024) Dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara, seseorang yang memiliki jaringan keluarga kuat atau berasal dari marga yang dihormati cenderung lebih mudah memperoleh dukungan politik dibandingkan individu yang tidak memiliki kedekatan kekerabatan, meskipun secara kemampuan belum tentu lebih unggul. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan lokal sering berputar dalam kelompok sosial yang sama, sehingga membuka peluang munculnya dinasti politik dan dominasi elite tertentu dalam pemerintahan daerah (Remanu et al., 2025).

. Dalam jurnal (Politik & Budaya, 2025) Pengaruh komunikasi politik yang berbasis *dalam Pilkades 2023 di Desa Situnggaling* terlihat jelas melalui pola mobilisasi sosial yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Dalam masyarakat Batak yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan serta struktur sosial yang didasarkan pada marga, ikatan primordial dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Politik identitas dalam kontestasi Pilkades di Desa Situnggaling menciptakan kondisi di mana solidaritas di dalam kelompok menjadi sangat kuat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan potensi disintegrasi atau perpecahan antar kelompok.

Meskipun ketegangan politik tersebut terjadi, dampaknya tidak sampai mengancam stabilitas kehidupan sosial masyarakat secara serius sehingga tidak memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah munculnya kesadaran berlebihan terhadap identitas kelompok marga, yang sering disebut sebagai etnosentrisme. Sikap ini menunjukkan keberpihakan yang terlalu kuat terhadap kelompok sendiri, sehingga berpotensi merusak hubungan sosial dan mengganggu keharmonisan antar kelompok etnis (Gianyar & Suacana, 2024). Perempuan sering kali tidak dipandang sebagai representasi yang sah dari keluarga atau kelompok kekerabatan, sehingga peluang mereka untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik menjadi lebih terbatas (Batubara, 2025). Akibatnya, kekuasaan lokal cenderung berputar dalam jaringan kekerabatan yang didominasi oleh laki-laki, yang pada akhirnya memperkuat eksklusivitas elite dan menghambat terciptanya representasi politik yang setara.

Analisis Feminisme: Relasi Kuasa, Representasi, dan Limitasi Perubahan

a. Representasi perempuan dalam politik: antara partisipasi substantif dan kuota administratif.

Teori Hanna Pitkin membagi representasi ke dalam empat dimensi: formal, deskriptif, substantif, dan simbolik (Widodo et al., 2023). Representasi formal berkaitan dengan aturan yang mengatur keterwakilan, seperti Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) yang menetapkan kuota minimal 30% perempuan, meskipun pada praktiknya seperti di Ponorogo pada Pemilu 2024 belum sepenuhnya terpenuhi. Representasi deskriptif melihat kesesuaian komposisi anggota dengan keberagaman gender, namun Panwaslu masih didominasi laki-laki walaupun terdapat perempuan dari berbagai latar belakang yang mendaftar. Representasi substantif menilai peran nyata perempuan dalam memperjuangkan kepentingan gender, yang

sering kali masih terbatas. Sementara itu, representasi simbolik berkaitan dengan pengaruh kehadiran perempuan terhadap persepsi publik, yang kerap dianggap hanya sebagai pemenuhan kuota. Keempat aspek ini membantu menjelaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi perempuan di masa depan. (Aldian Bagaskara & Muhammad Farid Ma'ruf, 2025).

Isu keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Walaupun jumlah perempuan dalam populasi hampir seimbang dengan laki-laki, keterlibatan mereka di lembaga legislatif masih relatif rendah. Menurut Mona Lena Krook (2010), perempuan hanya mengisi sekitar 18% kursi parlemen di dunia, meskipun beberapa negara telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, upaya meningkatkan partisipasi perempuan dilakukan melalui kebijakan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. (Fatharani et al., 2025). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024), keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 baru mencapai sekitar 21 persen. .

b. Tinjauan teori feminisme (radikal, sosialis) terhadap ketimpangan akses kekuasaan.

Dalam perspektif feminisme sosialis, penindasan perempuan berkaitan dengan hubungan antara kerja domestik di rumah dan kerja upahan di ruang publik yang sering menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara (Hanifa Maulidia, 2021). Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Kate Millett yang mengkritik kuat subordinasi perempuan oleh laki-laki. *Millett* menyatakan bahwa penindasan perempuan berakar pada ideologi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih unggul dan mengontrol tubuh serta kapasitas reproduksi perempuan, bahkan sering kali didukung oleh praktik kekerasan (Hamka, 2025). Nancy Fraser mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui pengakuan identitas atau peningkatan jumlah perempuan di posisi elit politik. Menurutnya, kesetaraan juga harus disertai dengan perubahan pada struktur ekonomi yang tidak adil. Melalui gagasan "Feminisme untuk 99%", Fraser menekankan pentingnya gerakan feminisme yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat (Mudzakkir, 2021).

Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dapat dipahami lebih jauh melalui konsep patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby. Walby mendefinisikan patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik yang memungkinkan laki-laki mendominasi serta mengeksploitasi perempuan melalui berbagai institusi seperti keluarga, negara, budaya, dan sistem kerja. Patriarki bekerja melalui beberapa struktur utama, antara lain produksi rumah tangga, hubungan kerja, negara, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan institusi budaya. Struktur-struktur ini saling berkaitan dan secara terus-menerus mereproduksi dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial (Tambunan & Sihotang, 2025). Dengan demikian, feminisme sosialis menilai bahwa upaya mencapai kesetaraan gender harus dilakukan dengan mengubah tidak hanya struktur patriarki, tetapi juga sistem ekonomi dan sosial yang mempertahankan ketimpangan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian mengenai dominasi maskulin di Sumatera Utara menunjukkan bahwa sistem marga patrilineal menjadi fondasi utama bagi reproduksi patriarki yang meluas hingga ke ranah politik lokal. Melalui siklus adat seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, otoritas laki-laki terus dilegitimasi dan diinternalisasi sebagai norma yang wajar dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan nilai-nilai maskulinitas, seperti ketegasan dan kekuatan, bertransformasi menjadi modal politik yang memudahkan laki-laki memperoleh kepercayaan pemilih dibandingkan perempuan. Penggunaan instrumen budaya seperti *Dalihan Na Tolu* pun turut memperkuat

dominasi ini dengan membangun jaringan kekuasaan berbasis kekerabatan yang cenderung eksklusif bagi kaum laki-laki. Akibatnya, meskipun terdapat kebijakan afirmatif kuota 30%, representasi perempuan di lembaga legislatif tetap rendah karena hambatan kultural dan struktural yang masih sangat kuat dalam sistem sosial masyarakat tersebut.

REFERENSI

- Adhuri, D. (2014). Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Antropologi Indonesia*, 0(68), 1–13. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i68.3433>
- Aulya Arzuliany, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Permasalahan Angkatan Kerja Di Indonesia : Kendala Gender Dan Pembatasan Pekerjaan Bagi Wanita Perspektif Patriarki Dan Feminisme. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(3), 268–275. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i3.3428>
- Asbari, W. T., Suwiknyo, E. S., Saptawan, E. K. S., & Hosen, M. Z. A. H. (2024). Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(4), 644–660. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.7764>
- Azizah, N. (2023). Direkonstruksi Komunikasi Sosial Kesetaraan Gender: Dalam Sistem Budaya Patriarki Di Indonesia. *Maddah : Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 5(2), 126–133. <https://doi.org/10.35316/maddah.v5i2.3471>
- Batubara, A. I. (2025). Kesenjangan Representasi Politik Perempuan: Analisis Gender di Tingkat Desa dan Kota. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan ...*, 1(3), 185–199. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah/article/view/57%0Ahttps://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/nizamiyah/article/download/57/53>
- Batubara, A. I., Katimin, K., & Sahrin, A. (2024). Politik Identitas Etnis Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Sinunukan). *Jurnal Al-Harakah*, 5(1), 32–37. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/article/view/20438>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Damayanti, E., Nurlita, D. 'Aina, & Arya Putra, D. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Friedmann, J. (2011). Insurgencies: Essays in planning theory. In *Insurgencies: Essays in Planning Theory*. <https://doi.org/10.4324/9780203832110>
- Gianyar, I. M., & Suacana, I. W. G. (2024). Etno-Nasionalisme dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 463–472. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.83323>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>
- Harianja, D., Rusmanto, J., & Sontoe, S. (2025). Marga Sebagai Simbol Identitas: Studi Kasus Pada Masyarakat Batak di Kota Palangka Raya. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 8(1), 135–144. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3267>
- Inovasi, J. S., Ijuk, B., & Bangka, K. (2021). *Politik Identitas* : 1(3), 80–85.
- Kaseng, E. S., Teknik, F., Makassar, U. N., Lokal, P., & Berkelanjutan, P. E. (2025). *Marginal Sosial*. 2(1), 1–8.
- Kinanti, A., & Hasan, Z. (2025). Sistem Kekerabatan Parental: Dampak, Implementasi, dan Struktur Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5),

772-779.

- Koentjaraningrat, 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat. Jakarta
- Lebih, M., Anak, D., & Khusus, B. (2024). *Sulawesi Tenggara Educational Journal*. 3.
- Mahayani, N. M. H. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 67-68.
- Meiyenti, S., & . S. (2014). Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 57. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i1.13>
- Mikha Valdo Tonggo Tambunan, & Sihotang, Y. F. (2025). Budaya Patriarki dalam Suku Batak Toba Terhadap Hak dan Kedudukan, Tradisi, Peran Gender, dan Perubahan Sosial. *Literasi Bahasa dan Sastra Jurnal*, 2(2), 75-86. <https://doi.org/10.63462/xyttsx63>
- Mulya, L. H., & Soetjipto, A. (2021). Maskulinitas sebagai Tonggak Keempat dalam Kajian Feminisme Hubungan Internasional. *Indonesian Perspective*, 6(2), 222-235. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43545>
- Munthe, H. M., & Hafi, B. (2018). Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 60-65. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.14>
- Ningrum. W. S. (2024). FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME(Studi Gender tentang Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Kalimah*, 5(1), 67.
- Politik, K., & Budaya, D. (2025). *Peran Pendidikan Berbasis Marga Suku Batak Dalam Membangun POLITIK IDENTITAS BUDAYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH: CULTURAL IDENTITY POLITICS IN LOCAL GOVERNMENT: The Role Of Batak Clan-Based Education In Building Political and Cultural Resilience*. X(1), 91-107.
- Rahman, M. T., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (2021). *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep dan Implementasi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmat, A. (2023). *Reformulasi Kebijakan Negara Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Studi Dinamika dan Keberlanjutan Nagari di Sumatera Barat*. 30-31. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47592/Aulia_Rahmat_Ringkasan_Disertasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rahmayanty, D., 1, Wulandari2, N., Pratama3, M. R., & Putri, N. (2022). Ketidaksetaraan Gender dalam Psikologi. *Tantangan dan Solusi*, 3, 1-10.
- Remanu, A. J. K., Ramadhani, N. A., Dewi, T. R., Azzahra, A. J., & Ridwan. (2025). Dampak Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Lokal: Kekuasaan Politik Keluarga Ratu Atut Di Provinsi Banten. *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 10(2), 1-18.
- Ruruh Aris Setyawibawa, M. M. (2025). *Rivalitas Politik Dinasti*. umsu press.
- Santoso et al. (2023). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga : Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2023), 1-14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Sarah Apriliandra, & Hetty Krisnani. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Saputra, R., & Bakar, A. (2025). *Pengaruh Komunikasi Politik Identitas Marga Batak Dalam Pemilihan Kepala Desa 2023*. 0147, 63-80.
- Soetanto, L. A., & Gandha, M. V. (2021). Dalihan Na Tolu: "Cara Hidup Orang Batak." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1), 297. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i1.10807>

- Separera Niron, E., & Bata Seda, A. (2021). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif. *Jurnal Aristo (Social, Political, Humaniora)*, 09(2), 203–228.
- Sugiarti. (2021). Budaya patriarki dalam cerita rakyat Jawa Timur (Patriarchal culture in East Javanese folklore). *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(2), 424–437. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara>
- Syawaludi, M. (2015). Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan Mohammad Syawaludin. *Sosiologi Reflektif*, 10(1), 175–198. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6874>
- Walby, S. (1990). *1990_Walby_Theorising_Patriarchy_book_Blackwell.pdf* (hal. 229)c.37670-none-1c9ecf58.pdf. (n.d.).
- Afriko, N., Am, R., Saputra, R., Wahyuni, S., Muhammadiyah, U., Barat, S., Pasir, J., No, J., Tigo, P. N., Koto, K., Padang, K., & Barat, S. (2025). 1 2 3 4. 4.
- Aini, K. (2017). Pergeseran Ideologi Patriarki dalam Peran Pengasuhan. *Jurnal Kritis*, 32(2), 176–197.
- Aldian Bagaskara, & Muhammad Farid Ma'ruf. (2025). Analisis Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo). *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 376–391.
- Asbari, W. T., Suwiknyo, E. S., Saptawan, E. K. S., & Hosen, M. Z. A. H. (2024). Dalam Bayang-bayang Maskulinitas: Studi Kasus Branding Politik Prabowo Subianto. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(4), 644–660. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i4.7764>
- Hamka, T. K. (2025). e-ISSN: 3031-6960. 2(9), 27–33.
- Hanifa Maulidia. (2021). Perempuan dalam kajian sosiologi gender: Konstruksi peran sosial, ruang publik, dan teori feminis. *Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 71–79. <https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi>
- Kington, H., Chapman, M., Clarke, C., & Beesley, S. (2018). Principles of marketing. In *BSAVA Manual of Small Animal Practice Management and Development*. <https://doi.org/10.22233/9781910443156.25>
- Mikha Valdo Tonggo Tambunan, & Sihotang, Y. F. (2025). Budaya Patriarki dalam Suku Batak Toba Terhadap Hak dan Kedudukan, Tradisi, Peran Gender, dan Perubahan Sosial. *Literasi Bahasa Dan Sastra Jurnal*, 2(2), 75–86. <https://doi.org/10.63462/xyttsx63>
- Mudzakkir, A. (2021). Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser. *Jurnal Ledalero*, 20(2), 235. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i2.234.235-257>
- Representasi, A., Perempuan, K., Pemilu, D., Kabupaten, L., Fatharani, A., Hakim, L., Deby, L., & Putri, M. (2025). Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029. *J-Innovative.Org*, 5, 7795–7804. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19640>
- Sahid, R., & Budianto, H. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Politik Airlangga Hartarto Dalam Membangun Political Branding Menjadi Capres 2024 Airlangga Hartarto's Political Marketing Communication Strategy in Building Political Branding To Become Presidential Candidate in 2024. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(2), 238–250.
- Sitompul, H., Ginting, B. C., Pelawi, E. R. A. B., Ramadhan, I. U., Ramadhan, S. A. P., Anadea, S., Manurung, R., & Annisa, S. (2025). Dominasi Laki-Laki Dalam Politik Indonesia: Hambatan Menuju Ketercapaian Representasi Substantif Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 541–556.

- Yariza, Z., Matondang, M., & Harahap, A. M. (2026). *THE POSITION AND RIGHTS OF WOMEN IN POLITICAL PARTIES IN INDONESIA (CASE STUDY: PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OF NORTH SUMATRA) Posisi dan Hak Perempuan dalam Berpartai Politik di Indonesia (Studi Kasus: Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara).* 10(1), 416–429. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7407>
- Yazid, A., & Harahap, B. (2025). Implementasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 3776–3784. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1997>
- Yunda D. Malindo¹, ; Muhammad Nawawi²; Irwansyah Kamindang³. (2023). Reinventing : Jurnal Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 5(1), 1–15.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (15 September 2025). Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin, 2024. Diakses pada 13 Maret 2026, dari <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQyIzI=/jumlah-anggota-dprd-menurut-kab-kota-dan-jenis-kelamin.html>